

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI RIAU 2016-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI RIAU 2016-2017



Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau 2016–2017

ISSN : 2654-3060
Nomor Publikasi : 14540.1809
Katalog BPS : 7203005.14

Ukuran Buku : 29,7 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 82 Halaman

Naskah :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau

Penyunting :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Ir. Aden Gultom, MM

Penanggung Jawab Teknis:

Agus Nuwibowo, SSi, MM

Editor:

Marthasari Julita Tambunan, SST

Penulis:

Jumiati, SE

Pengolah Data

Jumiati, SE

Desain/Layout:

Jumiati, SE

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau 2016–2017 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Data yang disajikan dalam publikasi ini berisi data yang memuat realisasi pendapatan & belanja (APBD) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Data yang dihasilkan merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur serta seluruh Kantor Bupati/Walikota melalui BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Publikasi ini juga memuat penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pemakai data.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan ekonomi secara umum. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diterbitkan, terutama Kantor Pemerintah Provinsi dan Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sebagai sumber data.

Akhirnya, saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau,



Ir. Aden Gultom, MM

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Ruang Lingkup Survei	1
1.3 Konsep dan Definisi	1
1.4 Penerimaan Daerah.....	2
1.5 Pengeluaran Daerah.....	5
II. URAIAN RINGKAS	11
2.1 Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.2 Penerimaan Daerah	11
2.3 Pengeluaran Daerah.....	14

<https://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (juta rupiah), 2016-2017	12
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (juta rupiah), 2016-2017	14
Tabel C	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2017	15
Tabel D	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2017	16
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	21
Tabel 1.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	22
Tabel 2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	23
Tabel 2.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	24
Tabel 3.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	27
Tabel 3.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	28
Tabel 4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	29
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	30
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	31
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	32
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	33
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	34
Tabel 4.6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	35
Tabel 4.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	36
Tabel 4.8	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	37

Tabel 4.9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	38
Tabel 4.10	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	39
Tabel 4.11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	40
Tabel 4.12	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2016-2017	41
Tabel 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	42
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	43
Tabel 5.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	44
Tabel 5.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	45
Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	46
Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	47
Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	48
Tabel 5.7	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	49
Tabel 5.8	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	50
Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	51
Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	52
Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017.....	53
Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	54
Tabel 6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	55
Tabel 6.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	56
Tabel 6.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	57
Tabel 6.3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	58
Tabel 6.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	59

Tabel 6.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	60
Tabel 6.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	61
Tabel 6.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	62
Tabel 6.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	63
Tabel 6.9	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	64
Tabel 6.10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	65
Tabel 6.11	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	66
Tabel 6.12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2016-2017	67
Tabel 7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	68
Tabel 7.1	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	69
Tabel 7.2	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	70
Tabel 7.3	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	71
Tabel 7.4	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	72
Tabel 7.5	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	73
Tabel 7.6	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	74
Tabel 7.7	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	75
Tabel 7.8	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	76
Tabel 7.9	Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	77
Tabel 7.10	Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	78
Tabel 7.11	Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung Untuk Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	79
Tabel 7.12	Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung Untuk Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	80

Tabel 7.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung Untuk Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	81
Tabel 7.14	Realisasi Pengeluaran Belanja Langsung Untuk Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2016-2017	82

<https://riau.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Riau selama dua periode tahun anggaran, yaitu Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- c. Informasi tentang jenis dan besaran bantuan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan Provinsi Riau dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota di Provinsi Riau. Data dikumpulkan melalui Survei Statistik Keuangan Pemerintah pada Kantor Gubernur dan 12 (dua belas) Kantor Bupati/Walikota di Provinsi Riau menggunakan daftar APBD-1 (Provinsi) dan APBD-2 (Kabupaten/Kota) yang memuat tentang anggaran dan belanja daerah tahun berjalan. Disamping itu, Survei Statistik Keuangan Pemerintah juga menanyakan tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah menggunakan daftar K-1 (Provinsi) dan K-2 (Kabupaten/Kota).

1.3 Konsep dan Definisi

Berikut beberapa penjelasan konsep dan definisi yang digunakan:

- a. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Adalah realisasi/perhitungan APBD provinsi pada tiap tahun anggaran.
- b. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten/Kota pada tiap tahun anggaran.
- c. Penerimaan Daerah dalam susunan laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.
- d. Pengeluaran Daerah/Belanja Daerah dalam susunan laporan keuangan terdiri atas belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan daerah.

1.4 Penerimaan Daerah

1.4.1 Pendapatan Daerah

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, terdiri dari :

1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

i. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

ii. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi daerah antara lain Adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau

pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

- iii. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1.4.1.2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- i. Bagi Hasil Pajak
Terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.
- ii. Bagi Hasil Bukan Pajak
Terdiri dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, iuran Tetap/landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.
- iii. Dana Alokasi Umum (DAU)
Adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

iv. Dana alokasi khusus (DAK) Adalah

Dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- ❖ Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- ❖ Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- ❖ Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan

1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

1.4.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan daerah, terdiri dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.
- 2) Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran

berkenaan.

- 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- 6) Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah serta swasta.

1.5 Pengeluaran Daerah

1.5.1 Belanja Daerah

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari :

1.5.1.1 Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

i. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

ii. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

iii. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

iv. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

v. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

vi. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

vii. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus

peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

viii. Pengeluaran Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

1.5.1.2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

i. Belanja Pegawai Langsung

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

ii. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

iii. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

1.5.2 Pembiayaan Daerah

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- 3) Pembayaran Pokok Utang Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- 4) Pemberian Pinjaman Daerah Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

<https://riau.bps.go.id>

**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau
Tahun 2016 - 2017 (y-o-y)**

Naik 27,59%

BENGKALIS



Kabupaten Bengkalis Merupakan Kabupaten yang mengalami kenaikan realisasi pendapatan daerah tertinggi di antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,09%.

II. URAIAN RINGKAS

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dimuat rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber-sumber pembiayaannya. Dimana Sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan cara melihat potensi daerahnya dari sisi pendapatan dan pengeluaran maka dapat disusun kebijakan yang tepat, maka dengan berdasarkan kebijakan tersebut aktivitas pemerintahan di Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2.2 Penerimaan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan yang akan digunakan oleh daerah dalam membiayai segala kebutuhan daerah. Sumber Pendapatan daerah di Provinsi Riau bersumber dari Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan sumber pendapatan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan penerimaan lainnya.

Pada Tabel A dijelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 6.942 miliar rupiah terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 3.111 miliar memiliki kontribusi sebesar 44,80 persen terhadap pendapatan Pemerintah Provinsi Riau, dengan komponen penyumbang terbesarnya adalah pajak daerah sebesar 2.417 miliar rupiah atau sebesar 34,82 persen. Pendapatan Pemerintah Provinsi Riau masih didominasi oleh komponen dana perimbangan dengan kontribusi sebesar 55,08 persen. Komponen terbesar dari dana perimbangan adalah dana alokasi khusus (DAK) yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan khusus Pemerintah Provinsi Riau sebesar 1.421 miliar rupiah atau sebesar 20,47 persen.

Dengan sumbangan sebesar 20,47 persen terhadap pendapatan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan di Provinsi Riau masih memiliki peranan yang sangat penting, guna menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerahnya. Pada tahun 2016 lain-lain pendapatan yang sah hanya berkontribusi sebesar 7,78 miliar atau sebesar 0.11 persen untuk pendapatan daerah Provinsi Riau.

Tabel A. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	6 942 927	8 859 018
1. Pendapatan Asli Daerah	3 110 656	3 735 800
- Pajak Daerah	2 417 977	3 000 000
- Retribusi Daerah	12 444	14 000
- Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	83 335	218 000
- Lain-lain PAD yang Sah	596 900	503 800
2. Dana Perimbangan	3 824 482	5 120 243
- Bagi Hasil Pajak	836 925	1 060 950
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	827 647	938 496
- Dana Alokasi Umum	738 379	1 434 458
- Dana Alokasi Khusus	1 421 530	1 686 339
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	7 789	2 975
PEMBIAYAAN DAERAH	3 132 206	2 149 132
JUMLAH	10 075 133	11 008 150

Catatan: *) Data APBD

Pada tahun 2016 penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Riau bersumber dari transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Riau pada Tahun 2016 sebesar 3.132 miliar rupiah yang terbentuk sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan target anggarannya dalam APBD Tahun 2017 menjadi sebesar 8.859 miliar rupiah. Dibandingkan Tahun 2016, terjadi peningkatan anggaran yang didukung oleh penerimaan pajak daerah yang cukup besar yaitu sebesar 3.000 miliar rupiah atau 33,86 persen terhadap total penerimaan Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau merupakan daerah otonomi yang mempunyai kemampuan untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah didaerahnya melalui penerimaan pajak daerah yang meningkat setiap tahunnya. Selain penerimaan dari pajak daerah, penerimaan Pemerintah Provinsi Riau didukung juga oleh peningkatan penerimaan dana perimbangan pada tahun 2017 sebesar 5.120 miliar atau sebesar 57,79 persen, yang masih didominasi oleh komponen dana alokasi khusus (DAK) sebesar 1.686 miliar rupiah atau 19,03 persen dan dana alokasi umum (DAU) sebesar 1.434 miliar rupiah atau 16,19 persen.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, total realisasi pendapatan di seluruh daerah kabupaten/kota se Provinsi Riau pada tahun 2016 tercatat sebesar 19.760 miliar rupiah. Sebagian besar pendapatan kabupaten/kota bersumber dari dana perimbangan sebesar 14.603 miliar rupiah atau sebesar 73,90 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3.312 miliar rupiah atau sebesar 16,76 persen. Sementara, pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah yaitu sebesar 1.844 miliar rupiah atau sebesar 9,33 persen. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan utama, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya. Oleh karena itu optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Riau Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	19 760 264	21 735 853
1. Pendapatan Asli Daerah	1 844 123	2 874 273
- Pajak Daerah	808 868	1 333 068
- Retribusi Daerah	196 373	372 031
- Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117 053	175 547
- Lain-lain PAD yang Sah	721 828	993 627
2. Dana Perimbangan	14 603 546	16 066 422
- Bagi Hasil Pajak	2 806 262	3 296 683
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 430 172	3 677 765
- Dana Alokasi Umum	6 251 628	6 678 723
- Dana Alokasi Khusus	2 115 484	2 413 251
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 312 595	2 795 157
PEMBIAYAAN DAERAH	1 888 831	1 023 426
JUMLAH	21 649 095	22 759 279

Catatan: *) Data APBD

2.3 Pengeluaran Daerah

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Riau Pada Tahun 2016 adalah sebesar 8.731 miliar rupiah, yang digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar 4.457 miliar rupiah, dan belanja langsung sebesar 4.274 miliar rupiah. Komponen terbesar yang mempengaruhi belanja Pemerintah Provinsi Riau adalah belanja modal sebesar 2.035 miliar rupiah atau sebesar 47,63 persen. Selanjutnya belanja barang dan jasa sebesar 1.951 miliar rupiah atau sebesar 45,64 persen, belanja hibah sebesar 1.303 miliar rupiah atau sebesar 29,25 persen.

Selanjutnya belanja bagi hasil sebesar 1.192 miliar rupiah atau sebesar 26,75 persen, dan untuk belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 1.007 miliar rupiah atau sebesar 22,61 persen. Pada tahun 2016 Total Pengeluaran pembiayaan daerah pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2016 sebesar 1 343 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Tabel C. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung	4 457 823	5 404 312
- Belanja Pegawai	1 007 962	2 311 534
- Belanja Bunga	0	0
- Belanja Subsidi	0	0
- Belanja Hibah	1 303 798	1 015 274
- Belanja Bantuan Sosial	6 649	10 000
- Belanja Bagi Hasil	1 192 559	1 390 026
- Belanja Bantuan Keuangan	945 142	565 920
- Pengeluaran Tidak Terduga	1 712	111 558
2. Belanja Langsung	4 274 115	5 603 838
- Belanja Pegawai	287 835	432 505
- Belanja Barang dan Jasa	1 950 645	2 625 349
- Belanja Modal	2 035 636	2 545 985
3. Pembiayaan Daerah	1 343 195	0
JUMLAH	10 075 133	11 008 150

Catatan: *) Data APBD

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 adalah sebesar 11.008 miliar rupiah, meningkat sebesar 26.07 persen dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2016 yang sebesar 10.075 miliar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pada belanja pegawai baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel D. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Riau Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung	11 068 728	10 859 933
- Belanja Pegawai	8 627 798	7 969 443
- Belanja Bunga	0	0
- Belanja Subsidi	31 513	30 021
- Belanja Hibah	380 971	275 374
- Belanja Bantuan Sosial	44 217	73 414
- Belanja Bagi Hasil	185 491	29 900
- Belanja Bantuan Keuangan	1 791 711	2 439 246
- Pengeluaran Tidak Terduga	7 027	42 535
4. Belanja Langsung	9 929 485	11 182 192
- Belanja Pegawai	1 152 664	1 248 510
- Belanja Barang dan Jasa	4 615 954	5 638 042
- Belanja Modal	4 160 867	4 295 640
Pembiayaan Daerah	650 882	717 154
JUMLAH	21 649 095	22 759 279

Catatan: *) Data APBD

Pada level Kabupaten/Kota sisi pengeluaran sebagian besar belanja pemerintah daerah kabupaten/kota lebih banyak terserap untuk kebutuhan belanja tidak langsung dibandingkan kebutuhan belanja langsung. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai total pengeluaran sebesar 21.649 miliar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar 11.068 miliar rupiah dan realisasi belanja langsung sebesar 9.929 miliar rupiah.

Pengeluaran belanja daerah sebagian besar dialokasikan pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar 8.627 miliar rupiah dan belanja bantuan keuangan sebesar 1.791 miliar rupiah. Dan pada belanja langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar 4.615 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 4.160 miliar rupiah. Dan belanja pegawai pada belanja langsung hanya sebesar 1.152 miliar rupiah. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan anggarannya sebesar 10.859 miliar rupiah, dengan komposisi belanja pegawai sebesar 7.969 miliar rupiah untuk belanja langsung, belanja barang dan jasa sebesar 5.638 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 4.295 miliar rupiah untuk belanja langsung.

<https://riau.bps.go.id>

TABEL-TABEL REALISASI PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH SELURUH INDONESIA



TABEL 1.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	275 571 195 995	319 202 213 198
1 Pendapatan Asli Daerah	133 179 011 317	140 994 204 504
1.1. Pajak Daerah	112 689 762 824	120 198 368 113
1.2. Retribusi Daerah	1 875 861 563	1 800 332 857
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 158 771 341	3 594 646 011
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	15 454 615 589	15 400 857 523
2 Dana Perimbangan	113 733 211 865	153 766 847 423
2.1. Bagi Hasil Pajak	22 178 206 076	26 727 770 029
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 488 357 513	7 691 292 443
2.3. Dana Alokasi Umum	38 538 077 004	55 417 530 820
2.4. Dana Alokasi Khusus	44 528 571 272	63 930 254 131
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	28 658 972 813	24 441 161 271
B. PEMBIAYAAN DAERAH	22 279 863 464	20 878 092 222
JUMLAH	297 851 059 459	340 080 305 420

*) APBD

**TABEL 1.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	157 921 957 110	196 309 841 141
1	Belanja Pegawai	41 420 506 302	77 691 661 339
2	Belanja Bunga	55 672 199	95 188 159
3	Belanja Subsidi	947 977 814	3 324 580 148
4	Belanja Hibah	53 831 992 474	51 090 706 312
5	Belanja Bantuan Sosial	3 404 874 370	3 449 704 803
6	Belanja Bagi Hasil	35 733 513 393	37 619 973 645
7	Belanja Bantuan Keuangan	22 465 736 129	22 096 641 048
8	Pengeluaran Tidak Terduga	61 684 429	941 385 687
B.	BELANJA LANGSUNG	106 176 521 472	132 762 535 484
1	Belanja Pegawai	7 366 638 255	8 995 849 364
2	Belanja Barang dan Jasa	54 033 172 998	68 003 215 757
3	Belanja Modal	44 776 710 219	55 763 470 363
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	33 752 580 877	11 007 928 795
JUMLAH		297 851 059 459	340 080 305 420

*) APBD

**TABEL 2.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	728 196 824 216	735 785 498 310
1 Pendapatan Asli Daerah	96 257 774 436	103 273 276 330
1.1. Pajak Daerah	44 843 906 635	48 637 698 258
1.2. Retribusi Daerah	8 342 625 938	9 834 888 723
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 698 548 121	4 073 090 502
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	39 372 693 742	40 727 598 847
2 Dana Perimbangan	513 371 240 233	511 738 259 170
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 632 940 797	27 273 679 817
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29 637 534 730	24 512 728 573
2.3. Dana Alokasi Umum	346 862 637 803	352 613 555 698
2.4. Dana Alokasi Khusus	110 238 126 903	107 338 295 082
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	118 567 809 547	120 773 962 810
B. PEMBIAYAAN DAERAH	80 058 657 743	46 308 030 358
JUMLAH	808 255 481 959	782 093 528 668

*) APBD

TABEL 2.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	383 243 126 468	404 591 120 274
1	Belanja Pegawai	283 497 413 806	284 769 437 006
2	Belanja Bunga	158 816 617	327 354 132
3	Belanja Subsidi	521 348 064	450 913 456
4	Belanja Hibah	14 963 437 667	13 939 408 554
5	Belanja Bantuan Sosial	3 788 285 585	3 856 526 499
6	Belanja Bagi Hasil	3 902 818 547	3 830 316 080
7	Belanja Bantuan Keuangan	75 126 821 026	95 442 363 366
8	Pengeluaran Tidak Terduga	1 284 185 156	1 974 801 181
B.	BELANJA LANGSUNG	355 399 435 814	369 763 932 318
1	Belanja Pegawai	27 614 873 151	33 611 458 612
2	Belanja Barang dan Jasa	151 470 552 490	167 252 457 546
3	Belanja Modal	176 314 010 173	168 900 016 160
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	69 612 919 677	7 738 476 076
JUMLAH		808 255 481 959	782 093 528 668

*) APBD

TABEL-TABEL REALISASI PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI RIAU



TABEL 3.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	6 942 926 673	8 859 017 596
1 Pendapatan Asli Daerah	3 110 656 140	3 735 800 000
1.1. Pajak Daerah	2 417 976 746	3 000 000 000
1.2. Retribusi Daerah	12 444 464	14 000 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	83 335 008	218 000 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	596 899 922	503 800 000
2 Dana Perimbangan	3 824 481 733	5 120 242 596
2.1. Bagi Hasil Pajak	836 925 397	1 060 950 201
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	827 647 310	938 495 645
2.3. Dana Alokasi Umum	738 378 737	1 434 458 151
2.4. Dana Alokasi Khusus	1 421 530 289	1 686 338 599
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	7 788 800	2 975 000
B. PEMBIAYAAN DAERAH	3 132 206 277	2 149 132 445
JUMLAH	10 075 132 950	11 008 150 041

*) APBD

TABEL 3.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	4 457 822 880	5 404 312 111
1 Belanja Pegawai	1 007 962 484	2 311 534 133
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0
4 Belanja Hibah	1 303 798 175	1 015 273 600
5 Belanja Bantuan Sosial	6 649 300	10 000 000
6 Belanja Bagi Hasil	1 192 559 065	1 390 025 921
7 Belanja Bantuan Keuangan	945 142 048	565 920 132
8 Pengeluaran Tidak Terduga	1 711 808	111 558 325
B. BELANJA LANGSUNG	4 274 115 270	5 603 837 930
1 Belanja Pegawai	287 834 567	432 504 511
2 Belanja Barang dan Jasa	1 950 644 869	2 625 348 904
3 Belanja Modal	2 035 635 834	2 545 984 515
C. PEMBIAYAAN DAERAH	1 343 194 800	0
JUMLAH	10 075 132 950	11 008 150 041

*) APBD

Tabel 4 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	19 760 263 949	21 735 852 757
1 Pendapatan Asli Daerah	1 844 122 950	2 874 273 212
1.1. Pajak Daerah	808 868 446	1 333 068 238
1.2. Retribusi Daerah	196 373 135	372 031 018
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117 053 496	175 547 052
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	721 827 873	993 626 904
2 Dana Perimbangan	14 603 545 981	16 066 422 194
2.1. Bagi Hasil Pajak	2 806 261 688	3 296 682 678
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 430 172 258	3 677 765 277
2.3. Dana Alokasi Umum	6 251 628 326	6 678 723 473
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 115 483 709	2 413 250 766
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 312 595 018	2 795 157 351
B. PEMBIAYAAN DAERAH	1 888 831 107	1 023 426 463
JUMLAH	21 649 095 056	22 759 279 220

*) APBD

Tabel 4.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Kuantan Singingi

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 226 968 996	1 374 402 960
1 Pendapatan Asli Daerah	62 176 253	75 433 898
1.1. Pajak Daerah	20 329 029	23 745 000
1.2. Retribusi Daerah	15 518 654	12 829 779
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 656 132	4 740 309
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	23 672 438	34 118 810
2 Dana Perimbangan	922 756 142	1 018 199 681
2.1. Bagi Hasil Pajak	37 372 842	46 384 436
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	144 077 298	162 812 475
2.3. Dana Alokasi Umum	600 665 068	595 651 223
2.4. Dana Alokasi Khusus	140 640 934	213 351 547
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	242 036 601	280 769 381
B. PEMBIAYAAN DAERAH	90 869 471	22 735 973
JUMLAH	1 317 838 467	1 397 138 933
*) APBD		

Tabel 4.2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Indragiri Hulu

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 397 276 479	1 404 727 978
1 Pendapatan Asli Daerah	98 728 487	109 733 193
1.1. Pajak Daerah	24 601 126	30 066 949
1.2. Retribusi Daerah	9 692 196	10 821 475
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 191 287	2 249 357
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	63 243 878	66 595 412
2 Dana Perimbangan	1 047 830 717	1 094 015 010
2.1. Bagi Hasil Pajak	102 919 439	110 996 347
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	155 961 340	152 177 569
2.3. Dana Alokasi Umum	629 877 226	635 827 022
2.4. Dana Alokasi Khusus	159 072 712	195 014 072
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	250 717 275	200 979 775
B. PEMBIAYAAN DAERAH	117 112 064	18 500 000
JUMLAH	1 514 388 543	1 423 227 978

*) APBD

Tabel 4.3 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Indragiri Hilir

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 837 559 118	1 936 208 169
1 Pendapatan Asli Daerah	132 442 800	164 898 821
1.1. Pajak Daerah	22 356 710	33 650 000
1.2. Retribusi Daerah	10 278 207	14 463 653
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 294 424	11 640 283
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	92 513 459	105 144 885
2 Dana Perimbangan	1 370 286 059	1 440 960 691
2.1. Bagi Hasil Pajak	50 624 756	81 093 709
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	148 025 197	224 242 686
2.3. Dana Alokasi Umum	898 404 765	903 929 296
2.4. Dana Alokasi Khusus	273 231 341	231 695 000
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	334 830 259	330 348 657
B. PEMBIAYAAN DAERAH	386 200 046	264 716 462
JUMLAH	2 223 759 164	2 200 924 631

*) APBD

Tabel 4.4 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Pelalawan

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 404 762 615	1 550 784 483
1 Pendapatan Asli Daerah	107 077 951	146 989 866
1.1. Pajak Daerah	35 812 150	59 769 000
1.2. Retribusi Daerah	10 091 113	13 782 224
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 778 898	16 786 319
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	54 395 790	56 652 323
2 Dana Perimbangan	1 099 078 220	1 194 672 117
2.1. Bagi Hasil Pajak	149 760 741	167 075 370
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	207 505 027	241 877 230
2.3. Dana Alokasi Umum	596 801 161	603 460 400
2.4. Dana Alokasi Khusus	145 011 291	182 259 117
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	198 606 444	209 122 500
B. PEMBIAYAAN DAERAH	292 181 544	240 367 592
JUMLAH	1 696 944 159	1 791 152 075

*) APBD

**Tabel 4.5 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Siak

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 638 282 231	1 671 605 416
1 Pendapatan Asli Daerah	164 325 691	199 247 637
1.1. Pajak Daerah	65 263 919	107 245 000
1.2. Retribusi Daerah	19 938 630	16 952 600
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34 416 359	34 300 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	44 706 783	40 750 037
2 Dana Perimbangan	1 251 262 083	1 271 514 226
2.1. Bagi Hasil Pajak	450 250 629	450 700 960
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	365 036 792	372 889 334
2.3. Dana Alokasi Umum	248 935 486	267 059 690
2.4. Dana Alokasi Khusus	187 039 176	180 864 242
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	222 694 457	200 843 553
B. PEMBIAYAAN DAERAH	60 826 513	16 000 000
JUMLAH	1 699 108 744	1 687 605 416

*) APBD

**Tabel 4.6 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Kampar

Jenis Penerimaan	2016*)	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	2 147 366 659	2 078 605 433
1 Pendapatan Asli Daerah	162 363 323	174 408 604
1.1. Pajak Daerah	66 719 697	58 584 050
1.2. Retribusi Daerah	9 966 314	12 421 388
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20 611 304	30 295 286
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	65 066 008	73 107 880
2 Dana Perimbangan	1 571 302 636	1 626 825 574
2.1. Bagi Hasil Pajak	255 126 584	243 343 297
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	287 883 664	309 857 450
2.3. Dana Alokasi Umum	721 681 861	735 072 678
2.4. Dana Alokasi Khusus	306 610 527	338 552 149
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	413 700 700	277 371 255
B. PEMBIAYAAN DAERAH	275 807 460	50 535 110
JUMLAH	2 423 174 119	2 129 140 543

*) APBD

**Tabel 4.7 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Rokan Hulu

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 445 493 028	1 422 440 573
1 Pendapatan Asli Daerah	95 812 027	108 151 659
1.1. Pajak Daerah	20 038 973	29 226 400
1.2. Retribusi Daerah	6 845 122	7 996 123
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 590 062	2 327 781
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	67 337 870	68 601 355
2 Dana Perimbangan	1 053 662 417	1 119 427 444
2.1. Bagi Hasil Pajak	91 127 422	93 754 418
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	142 982 212	179 489 609
2.3. Dana Alokasi Umum	641 114 579	646 579 487
2.4. Dana Alokasi Khusus	178 438 204	199 603 930
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	296 018 584	194 861 470
B. PEMBIAYAAN DAERAH	-527 916	45 000 000
JUMLAH	1 444 965 112	1 467 440 573

**) Angka Estimasi

*) APBD

**Tabel 4.8 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Bengkalis

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	2 880 599 612	3 480 370 000
1 Pendapatan Asli Daerah	199 026 652	308 150 000
1.1. Pajak Daerah	47 854 329	75 000 000
1.2. Retribusi Daerah	31 187 868	60 000 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21 238 126	40 000 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	98 746 329	133 150 000
2 Dana Perimbangan	2 332 553 477	2 834 775 000
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 175 781 702	1 664 716 000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 088 459 033	752 433 000
2.3. Dana Alokasi Umum	0	345 071 000
2.4. Dana Alokasi Khusus	68 312 742	72 555 000
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	349 019 483	337 445 000
B. PEMBIAYAAN DAERAH	280 383 250	220 891 521
JUMLAH	3 160 982 862	3 701 261 521

*) APBD

**Tabel 4.9 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten: Rokan Hilir

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 601 526 554	1 799 526 292
1 Pendapatan Asli Daerah	94 964 714	111 176 179
1.1. Pajak Daerah	29 827 888	29 172 000
1.2. Retribusi Daerah	3 543 955	4 650 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 315 957	10 050 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	53 276 914	67 304 179
2 Dana Perimbangan	1 288 741 024	1 481 017 302
2.1. Bagi Hasil Pajak	276 813 195	241 335 402
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	391 696 391	685 903 873
2.3. Dana Alokasi Umum	347 000 097	367 378 643
2.4. Dana Alokasi Khusus	273 231 341	186 399 384
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	217 820 816	207 332 811
B. PEMBIAYAAN DAERAH	256 886 980	25 000 615
JUMLAH	1 858 413 534	1 824 526 907
*) APBD		

Tabel 4.10 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten :Kepulauan Meranti

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 028 514 377	1 117 260 504
1 Pendapatan Asli Daerah	52 413 812	63 000 000
1.1. Pajak Daerah	8 498 543	10 304 940
1.2. Retribusi Daerah	2 567 768	2 898 200
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 984 775	10 000 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	32 362 726	39 796 860
2 Dana Perimbangan	746 499 112	808 672 687
2.1. Bagi Hasil Pajak	69 386 512	76 424 735
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	199 075 073	173 251 783
2.3. Dana Alokasi Umum	371 690 224	378 723 254
2.4. Dana Alokasi Khusus	106 347 303	180 272 915
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	229 601 453	245 587 817
B. PEMBIAYAAN DAERAH	16 054 955	100 000 000
JUMLAH	1 044 569 332	1 217 260 504
*) APBD		

**Tabel 4.11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kota :Pekanbaru

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	2 089 873 333	2 604 468 820
1 Pendapatan Asli Daerah	482 031 165	1 148 930 504
1.1. Pajak Daerah	390 306 715	783 260 372
1.2. Retribusi Daerah	51 476 936	175 007 334
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 067 485	5 810 291
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	37 180 029	184 852 507
2 Dana Perimbangan	1 230 454 953	1 320 906 553
2.1. Bagi Hasil Pajak	115 428 508	63 392 172
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	142 575 407	210 732 381
2.3. Dana Alokasi Umum	789 341 355	791 327 000
2.4. Dana Alokasi Khusus	183 109 683	255 455 000
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	377 387 215	134 631 763
B. PEMBIAYAAN DAERAH	17 780 283	19 679 190
JUMLAH	2 107 653 616	2 624 148 010
*) APBD		

Tabel 4.12 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kota :Dumai

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 062 040 947	1 295 452 129
1 Pendapatan Asli Daerah	192 760 075	264 152 851
1.1. Pajak Daerah	77 259 367	93 044 527
1.2. Retribusi Daerah	25 266 372	40 208 242
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	908 687	7 347 426
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	89 325 649	123 552 656
2 Dana Perimbangan	689 119 141	855 435 909
2.1. Bagi Hasil Pajak	31 669 358	57 465 832
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	156 894 824	212 097 887
2.3. Dana Alokasi Umum	406 116 504	408 643 780
2.4. Dana Alokasi Khusus	94 438 455	177 228 410
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	180 161 731	175 863 369
B. PEMBIAYAAN DAERAH	95 256 456	0
JUMLAH	1 157 297 403	1 295 452 129
*) APBD		

Tabel 5. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		18 384 144 037	18 839 679 081
1	Kuantan Singingi	1 317 838 467	1 397 138 933
2	Indragiri Hulu	1 514 388 544	1 423 227 978
3	Indragiri Hilir	2 223 759 164	2 200 924 631
4	Pelalawan	1 696 944 159	1 791 152 075
5	Siak	1 699 108 744	1 687 605 416
6	Kampar	2 423 174 119	2 129 140 543
7	Rokan Hulu	1 444 965 112	1 467 440 573
8	Bengkalis	3 160 982 862	3 701 261 521
9	Rokan Hilir	1 858 413 534	1 824 526 907
10	Kepulauan Meranti	1 044 569 332	1 217 260 504
Kota		3 264 951 019	3 919 600 139
71	Pekanbaru	2 107 653 616	2 624 148 010
72	Dumai	1 157 297 403	1 295 452 129
JUMLAH		21 649 095 056	22 759 279 220

*) APBD

Tabel 5.1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten	1 169 331 710	1 461 189 857
1 Kuantan Singingi	62 176 253	75 433 898
2 Indragiri Hulu	98 728 487	109 733 193
3 Indragiri Hilir	132 442 800	164 898 821
4 Pelalawan	107 077 951	146 989 866
5 Siak	164 325 691	199 247 637
6 Kampar	162 363 323	174 408 604
7 Rokan Hulu	95 812 027	108 151 659
8 Bengkalis	199 026 652	308 150 000
9 Rokan Hilir	94 964 714	111 176 179
10 Kepulauan Meranti	52 413 812	63 000 000
Kota	674 791 240	1 413 083 355
71 Pekanbaru	482 031 165	1 148 930 504
72 Dumai	192 760 075	264 152 851
JUMLAH	1 844 122 950	2 874 273 212

*) APBD

Tabel 5.2 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
Kabupaten	341 302 364	456 763 339
1 Kuantan Singingi	20 329 029	23 745 000
2 Indragiri Hulu	24 601 126	30 066 949
3 Indragiri Hilir	22 356 710	33 650 000
4 Pelalawan	35 812 150	59 769 000
5 Siak	65 263 919	107 245 000
6 Kampar	66 719 697	58 584 050
7 Rokan Hulu	20 038 973	29 226 400
8 Bengkalis	47 854 329	75 000 000
9 Rokan Hilir	29 827 888	29 172 000
10 Kepulauan Meranti	8 498 543	10 304 940
Kota	467 566 082	876 304 899
71 Pekanbaru	390 306 715	783 260 372
72 Dumai	77 259 367	93 044 527
JUMLAH	808 868 446	1 333 068 238

*) APBD

Tabel 5.3 REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		119 629 827	156 815 442
1	Kuantan Singingi	15 518 654	12 829 779
2	Indragiri Hulu	9 692 196	10 821 475
3	Indragiri Hilir	10 278 207	14 463 653
4	Pelalawan	10 091 113	13 782 224
5	Siak	19 938 630	16 952 600
6	Kampar	9 966 314	12 421 388
7	Rokan Hulu	6 845 122	7 996 123
8	Bengkalis	31 187 868	60 000 000
9	Rokan Hilir	3 543 955	4 650 000
10	Kepulauan Meranti	2 567 768	2 898 200
Kota		76 743 308	215 215 576
71	Pekanbaru	51 476 936	175 007 334
72	Dumai	25 266 372	40 208 242
JUMLAH		196 373 135	372 031 018

*) APBD

Tabel 5.4 REALISASI PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		113 077 324	162 389 335
1	Kuantan Singingi	2 656 132	4 740 309
2	Indragiri Hulu	1 191 287	2 249 357
3	Indragiri Hilir	7 294 424	11 640 283
4	Pelalawan	6 778 898	16 786 319
5	Siak	34 416 359	34 300 000
6	Kampar	20 611 304	30 295 286
7	Rokan Hulu	1 590 062	2 327 781
8	Bengkalis	21 238 126	40 000 000
9	Rokan Hilir	8 315 957	10 050 000
10	Kepulauan Meranti	8 984 775	10 000 000
Kota		3 976 172	13 157 717
71	Pekanbaru	3 067 485	5 810 291
72	Dumai	908 687	7 347 426
JUMLAH		117 053 496	175 547 052
*)	APBD		

**Tabel 5.5 REALISASI PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-
2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		595 322 195	685 221 741
1	Kuantan Singingi	23 672 438	34 118 810
2	Indragiri Hulu	63 243 878	66 595 412
3	Indragiri Hilir	92 513 459	105 144 885
4	Pelalawan	54 395 790	56 652 323
5	Siak	44 706 783	40 750 037
6	Kampar	65 066 008	73 107 880
7	Rokan Hulu	67 337 870	68 601 355
8	Bengkalis	98 746 329	133 150 000
9	Rokan Hilir	53 276 914	67 304 179
10	Kepulauan Meranti	32 362 726	39 796 860
Kota		126 505 678	308 405 163
71	Pekanbaru	37 180 029	184 852 507
72	Dumai	89 325 649	123 552 656
JUMLAH		721 827 873	993 626 904
*)	APBD		

Tabel 5.6 REALISASI PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		12 683 971 887	13 890 079 732
1	Kuantan Singingi	922 756 142	1 018 199 681
2	Indragiri Hulu	1 047 830 717	1 094 015 010
3	Indragiri Hilir	1 370 286 059	1 440 960 691
4	Pelalawan	1 099 078 220	1 194 672 117
5	Siak	1 251 262 083	1 271 514 226
6	Kampar	1 571 302 636	1 626 825 574
7	Rokan Hulu	1 053 662 417	1 119 427 444
8	Bengkalis	2 332 553 477	2 834 775 000
9	Rokan Hilir	1 288 741 024	1 481 017 302
10	Kepulauan Meranti	746 499 112	808 672 687
Kota		1 919 574 094	2 176 342 462
71	Pekanbaru	1 230 454 953	1 320 906 553
72	Dumai	689 119 141	855 435 909
JUMLAH		14 603 545 981	16 066 422 194

*) APBD

Tabel 5.7 REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		2 659 163 822	3 175 824 674
1	Kuantan Singingi	37 372 842	46 384 436
2	Indragiri Hulu	102 919 439	110 996 347
3	Indragiri Hilir	50 624 756	81 093 709
4	Pelalawan	149 760 741	167 075 370
5	Siak	450 250 629	450 700 960
6	Kampar	255 126 584	243 343 297
7	Rokan Hulu	91 127 422	93 754 418
8	Bengkalis	1 175 781 702	1 664 716 000
9	Rokan Hilir	276 813 195	241 335 402
10	Kepulauan Meranti	69 386 512	76 424 735
Kota		147 097 866	120 858 004
71	Pekanbaru	115 428 508	63 392 172
72	Dumai	31 669 358	57 465 832
JUMLAH		2 806 261 688	3 296 682 678

*) APBD

**Tabel 5.8 REALISASI PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		3 130 702 027	3 254 935 009
1	Kuantan Singingi	144 077 298	162 812 475
2	Indragiri Hulu	155 961 340	152 177 569
3	Indragiri Hilir	148 025 197	224 242 686
4	Pelalawan	207 505 027	241 877 230
5	Siak	365 036 792	372 889 334
6	Kampar	287 883 664	309 857 450
7	Rokan Hulu	142 982 212	179 489 609
8	Bengkalis	1 088 459 033	752 433 000
9	Rokan Hilir	391 696 391	685 903 873
10	Kepulauan Meranti	199 075 073	173 251 783
Kota		299 470 231	422 830 268
71	Pekanbaru	142 575 407	210 732 381
72	Dumai	156 894 824	212 097 887
JUMLAH		3 430 172 258	3 677 765 277
*)	APBD		

Tabel 5.9 REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		5 056 170 467	5 478 752 693
1	Kuantan Singingi	600 665 068	595 651 223
2	Indragiri Hulu	629 877 226	635 827 022
3	Indragiri Hilir	898 404 765	903 929 296
4	Pelalawan	596 801 161	603 460 400
5	Siak	248 935 486	267 059 690
6	Kampar	721 681 861	735 072 678
7	Rokan Hulu	641 114 579	646 579 487
8	Bengkalis	0	345 071 000
9	Rokan Hilir	347 000 097	367 378 643
10	Kepulauan Meranti	371 690 224	378 723 254
Kota		1 195 457 859	1 199 970 780
71	Pekanbaru	789 341 355	791 327 000
72	Dumai	406 116 504	408 643 780
JUMLAH		6 251 628 326	6 678 723 473

*) APBD

**Tabel 5.10 REALISASI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		1 837 935 571	1 980 567 356
1	Kuantan Singingi	140 640 934	213 351 547
2	Indragiri Hulu	159 072 712	195 014 072
3	Indragiri Hilir	273 231 341	231 695 000
4	Pelalawan	145 011 291	182 259 117
5	Siak	187 039 176	180 864 242
6	Kampar	306 610 527	338 552 149
7	Rokan Hulu	178 438 204	199 603 930
8	Bengkalis	68 312 742	72 555 000
9	Rokan Hilir	273 231 341	186 399 384
10	Kepulauan Meranti	106 347 303	180 272 915
Kota		277 548 138	432 683 410
71	Pekanbaru	183 109 683	255 455 000
72	Dumai	94 438 455	177 228 410
JUMLAH		2 115 483 709	2 413 250 766

*) APBD

**Tabel 5.11 REALISASI PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		2 755 046 072	2 484 662 219
1	Kuantan Singingi	242 036 601	280 769 381
2	Indragiri Hulu	250 717 275	200 979 775
3	Indragiri Hilir	334 830 259	330 348 657
4	Pelalawan	198 606 444	209 122 500
5	Siak	222 694 457	200 843 553
6	Kampar	413 700 700	277 371 255
7	Rokan Hulu	296 018 584	194 861 470
8	Bengkalis	349 019 483	337 445 000
9	Rokan Hilir	217 820 816	207 332 811
10	Kepulauan Meranti	229 601 453	245 587 817
Kota		557 548 946	310 495 132
71	Pekanbaru	377 387 215	134 631 763
72	Dumai	180 161 731	175 863 369
JUMLAH		3 312 595 018	2 795 157 351
*)	APBD		

Tabel 5.12 REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		1 775 794 368	1 003 747 273
1	Kuantan Singingi	90 869 471	22 735 973
2	Indragiri Hulu	117 112 065	18 500 000
3	Indragiri Hilir	386 200 046	264 716 462
4	Pelalawan	292 181 544	240 367 592
5	Siak	60 826 513	16 000 000
6	Kampar	275 807 460	50 535 110
7	Rokan Hulu	- 527 916	45 000 000
8	Bengkalis	280 383 250	220 891 521
9	Rokan Hilir	256 886 980	25 000 615
10	Kepulauan Meranti	16 054 955	100 000 000
Kota		113 036 739	19 679 190
71	Pekanbaru	17 780 283	19 679 190
72	Dumai	95 256 456	0
JUMLAH		1 888 831 107	1 023 426 463

*) APBD

Tabel 6 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11 068 728 076	10 859 933 182
1	Belanja Pegawai	8 627 797 929	7 969 442 514
2	Belanja Bunga	0	0
3	Belanja Subsidi	31 513 239	30 020 931
4	Belanja Hibah	380 971 355	275 374 270
5	Belanja Bantuan Sosial	44 216 980	73 413 597
6	Belanja Bagi Hasil	185 491 096	29 900 208
7	Belanja Bantuan Keuangan	1 791 710 596	2 439 246 288
8	Pengeluaran Tidak Terduga	7 026 881	42 535 374
B.	BELANJA LANGSUNG	9 929 485 304	11 182 191 907
1	Belanja Pegawai	1 152 664 416	1 248 509 679
2	Belanja Barang dan Jasa	4 615 954 008	5 638 042 450
3	Belanja Modal	4 160 866 880	4 295 639 778
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	650 881 676	717 154 131
JUMLAH		21 649 095 056	22 759 279 220

*) APBD

Tabel 6.1 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Kuantan Singingi

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	870 127 822	857 643 266
1 Belanja Pegawai	690 972 779	601 137 013
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0
4 Belanja Hibah	10 230 964	22 347 600
5 Belanja Bantuan Sosial	5 787 650	6 000 000
6 Belanja Bagi Hasil	162 448 172	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	688 257	224 399 153
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0	3 759 500
B. BELANJA LANGSUNG	417 924 798	539 495 667
1 Belanja Pegawai	0	98 492 016
2 Belanja Barang dan Jasa	239 908 435	231 626 271
3 Belanja Modal	178 016 363	209 377 380
C. PEMBIAYAAN DAERAH	29 785 847	0
JUMLAH	1 317 838 467	1 397 138 933

*) APBD

Tabel 6.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Indragiri Hulu

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	783 625 923	779 969 396
1 Belanja Pegawai	579 951 739	539 132 161
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0
4 Belanja Hibah	500 000	0
5 Belanja Bantuan Sosial	0	200 000
6 Belanja Bagi Hasil	4 551 341	4 088 843
7 Belanja Bantuan Keuangan	196 804 843	235 548 392
8 Pengeluaran Tidak Terduga	1 818 000	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG	692 744 310	643 258 582
1 Belanja Pegawai	35 078 857	22 596 023
2 Belanja Barang dan Jasa	410 687 695	391 790 402
3 Belanja Modal	246 977 758	228 872 157
C. PEMBIAYAAN DAERAH	38 018 311	0
JUMLAH	1 514 388 544	1 423 227 978

*) APBD

Tabel 6.3 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Indragiri Hilir

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 156 243 711	1 111 117 766
1 Belanja Pegawai	853 107 114	773 415 116
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	2 000 000
4 Belanja Hibah	61 101 031	50 467 400
5 Belanja Bantuan Sosial	610 000	550 938
6 Belanja Bagi Hasil	3 967 724	4 811 365
7 Belanja Bantuan Keuangan	237 457 842	278 980 947
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0	892 000
B. BELANJA LANGSUNG	833 854 913	1 074 106 865
1 Belanja Pegawai	86 324 578	61 343 819
2 Belanja Barang dan Jasa	418 475 910	575 044 637
3 Belanja Modal	329 054 425	437 718 409
C. PEMBIAYAAN DAERAH	233 660 540	15 700 000
JUMLAH	2 223 759 164	2 200 924 631

*) APBD

Tabel 6.4 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten :Pelalawan

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	718 086 519	731 115 261
1 Belanja Pegawai	542 776 823	526 485 566
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0
4 Belanja Hibah	18 049 413	21 572 200
5 Belanja Bantuan Sosial	6 150 750	3 862 750
6 Belanja Bagi Hasil	0	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	151 109 533	178 494 745
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0	700 000
B. BELANJA LANGSUNG	921 046 975	843 474 101
1 Belanja Pegawai	166 904 058	158 068 941
2 Belanja Barang dan Jasa	299 458 789	385 166 615
3 Belanja Modal	454 684 128	300 238 545
C. PEMBIAYAAN DAERAH	57 810 665	216 562 713
JUMLAH	1 696 944 159	1 791 152 075

*) APBD

**Tabel 6.5 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Siak

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	830 079 455	872 408 576
1	Belanja Pegawai	622 363 555	600 645 973
2	Belanja Bunga	0	0
3	Belanja Subsidi	2 190 864	5 627 623
4	Belanja Hibah	25 409 721	17 074 400
5	Belanja Bantuan Sosial	14 042 480	31 562 420
6	Belanja Bagi Hasil	835 529	1 200 000
7	Belanja Bantuan Keuangan	165 071 306	215 298 160
8	Pengeluaran Tidak Terduga	166 000	1 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	856 731 289	680 196 840
1	Belanja Pegawai	179 307 503	14 817 488
2	Belanja Barang dan Jasa	424 663 198	569 360 943
3	Belanja Modal	252 760 588	96 018 409
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	12 298 000	135 000 000
JUMLAH		1 699 108 744	1 687 605 416

*) APBD

**Tabel 6.6 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten : Kampar

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 444 276 806	1 339 713 900
1 Belanja Pegawai	1 134 148 208	996 820 564
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	2 723 332	3 177 221
4 Belanja Hibah	64 595 532	23 645 600
5 Belanja Bantuan Sosial	8 857 300	10 151 739
6 Belanja Bagi Hasil	2 894 389	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	230 892 045	295 668 776
8 Pengeluaran Tidak Terduga	166 000	10 250 000
B. BELANJA LANGSUNG	916 230 710	789 426 643
1 Belanja Pegawai	76 726 601	52 127 717
2 Belanja Barang dan Jasa	461 781 872	498 112 348
3 Belanja Modal	377 722 237	239 186 578
C. PEMBIAYAAN DAERAH	62 666 603	0
JUMLAH	2 423 174 119	2 129 140 543

*) APBD

Tabel 6.7 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Rokan Hulu

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	762 784 691	793 578 513
1 Belanja Pegawai	585 552 263	557 974 502
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	0	0
4 Belanja Hibah	17 727 090	13 816 000
5 Belanja Bantuan Sosial	337 000	2 010 000
6 Belanja Bagi Hasil	3 794 641	6 300 000
7 Belanja Bantuan Keuangan	152 253 272	210 978 011
8 Pengeluaran Tidak Terduga	3 120 425	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG	633 228 040	673 862 060
1 Belanja Pegawai	98 653 829	95 426 000
2 Belanja Barang dan Jasa	282 222 731	320 229 401
3 Belanja Modal	252 351 480	258 206 659
C. PEMBIAYAAN DAERAH	48 952 381	0
JUMLAH	1 444 965 112	1 467 440 573

*) APBD

Tabel 6.8 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Bengkalis

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 502 858 498	1 488 603 971
1 Belanja Pegawai	1 046 900 039	1 009 409 236
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	4 853 980	9 707 959
4 Belanja Hibah	78 442 810	35 371 600
5 Belanja Bantuan Sosial	0	0
6 Belanja Bagi Hasil	6 999 300	13 500 000
7 Belanja Bantuan Keuangan	365 216 019	401 681 302
8 Pengeluaran Tidak Terduga	446 350	18 933 874
B. BELANJA LANGSUNG	1 643 876 065	2 212 657 550
1 Belanja Pegawai	149 506 613	69 313 550
2 Belanja Barang dan Jasa	728 626 506	1 020 386 065
3 Belanja Modal	765 742 946	1 122 957 935
C. PEMBIAYAAN DAERAH	14 248 299	0
JUMLAH	3 160 982 862	3 701 261 521

*) APBD

Tabel 6.9 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Rokan Hilir

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	848 249 310	752 975 231
1 Belanja Pegawai	610 374 362	477 232 320
2 Belanja Bunga	0	0
3 Belanja Subsidi	7 423 440	4 065 408
4 Belanja Hibah	18 580 614	17 633 470
5 Belanja Bantuan Sosial	8 431 800	9 500 000
6 Belanja Bagi Hasil	0	0
7 Belanja Bantuan Keuangan	203 439 094	243 544 033
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG	1 002 578 372	796 206 628
1 Belanja Pegawai	217 338 148	165 209 274
2 Belanja Barang dan Jasa	385 596 091	393 216 543
3 Belanja Modal	399 644 133	237 780 811
C. PEMBIAYAAN DAERAH	7 585 852	275 345 048
JUMLAH	1 858 413 534	1 824 526 907

*) APBD

Tabel 6.10 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten : Kepulauan Meranti

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	478 721 765	588 665 565
1	Belanja Pegawai	362 825 308	393 265 565
2	Belanja Bunga	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0
4	Belanja Hibah	30 173 400	40 000 000
5	Belanja Bantuan Sosial	0	3 400 000
6	Belanja Bagi Hasil	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	85 723 057	151 000 000
8	Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	544 407 100	590 794 940
1	Belanja Pegawai	90 324 692	108 794 905
2	Belanja Barang dan Jasa	200 677 391	280 957 422
3	Belanja Modal	253 405 017	201 042 613
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	21 440 467	37 799 999
JUMLAH		1 044 569 332	1 217 260 504

*) APBD

**TABEL 6.11 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017**

Kota : Pekanbaru

Jenis Pengeluaran		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 025 536 764	1 040 819 009
1	Belanja Pegawai	958 138 369	1 007 259 759
2	Belanja Bunga	0	0
3	Belanja Subsidi	14 321 623	3 000 000
4	Belanja Hibah	50 790 780	25 156 000
5	Belanja Bantuan Sosial	0	3 403 250
6	Belanja Bagi Hasil	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	999 886	1 000 000
8	Pengeluaran Tidak Terduga	1 286 106	1 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	1 000 026 690	1 561 371 267
1	Belanja Pegawai	0	239 130 132
2	Belanja Barang dan Jasa	549 684 919	646 311 633
3	Belanja Modal	450 341 771	675 929 502
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	82 090 162	21 957 734
JUMLAH		2 107 653 616	2 624 148 010

*) APBD

Tabel 6.12 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2016-2017

Kota : Dumai

Kota : Dumai			
Jenis Pengeluaran	2016	2017*)	
(1)	(2)	(3)	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	648 136 812	503 322 728	
1 Belanja Pegawai	640 687 370	486 664 739	
2 Belanja Bunga	0	0	
3 Belanja Subsidi	0	2 442 720	
4 Belanja Hibah	5 370 000	8 290 000	
5 Belanja Bantuan Sosial	0	2 772 500	
6 Belanja Bagi Hasil	0	0	
7 Belanja Bantuan Keuangan	2 055 442	2 652 769	
8 Pengeluaran Tidak Terduga	24 000	500 000	
B. BELANJA LANGSUNG	466 836 042	777 340 764	
1 Belanja Pegawai	52 499 537	163 189 814	
2 Belanja Barang dan Jasa	214 170 471	325 840 170	
3 Belanja Modal	200 166 034	288 310 780	
C. PEMBIAYAAN DAERAH	42 324 549	14 788 637	
JUMLAH	1 157 297 403	1 295 452 129	

*) APBD

Tabel 7 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		18 384 144 037	18 839 679 081
1	Kuantan Singingi	1 317 838 467	1 397 138 933
2	Indragiri Hulu	1 514 388 544	1 423 227 978
3	Indragiri Hilir	2 223 759 164	2 200 924 631
4	Pelalawan	1 696 944 159	1 791 152 075
5	Siak	1 699 108 744	1 687 605 416
6	Kampar	2 423 174 119	2 129 140 543
7	Rokan Hulu	1 444 965 112	1 467 440 573
8	Bengkalis	3 160 982 862	3 701 261 521
9	Rokan Hilir	1 858 413 534	1 824 526 907
10	Kepulauan Meranti	1 044 569 332	1 217 260 504
Kota		3 264 951 019	3 919 600 139
71	Pekanbaru	2 107 653 616	2 624 148 010
72	Dumai	1 157 297 403	1 295 452 129
JUMLAH		21 649 095 056	22 759 279 220

*) APBD

**Tabel 7.1 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		9 395 054 500	9 315 791 445
1	Kuantan Singingi	870 127 822	857 643 266
2	Indragiri Hulu	783 625 923	779 969 396
3	Indragiri Hilir	1 156 243 711	1 111 117 766
4	Pelalawan	718 086 519	731 115 261
5	Siak	830 079 455	872 408 576
6	Kampar	1 444 276 806	1 339 713 900
7	Rokan Hulu	762 784 691	793 578 513
8	Bengkalis	1 502 858 498	1 488 603 971
9	Rokan Hilir	848 249 310	752 975 231
10	Kepulauan Meranti	478 721 765	588 665 565
Kota		1 673 673 576	1 544 141 737
71	Pekanbaru	1 025 536 764	1 040 819 009
72	Dumai	648 136 812	503 322 728
JUMLAH		11 068 728 076	10 859 933 182

*) APBD

Tabel 7.2 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		7 028 972 190	6 475 518 027
1	Kuantan Singingi	690 972 779	601 137 013
2	Indragiri Hulu	579 951 739	539 132 161
3	Indragiri Hilir	853 107 114	773 415 116
4	Pelalawan	542 776 823	526 485 566
5	Siak	622 363 555	600 645 973
6	Kampar	1 134 148 208	996 820 564
7	Rokan Hulu	585 552 263	557 974 513
8	Bengkalis	1 046 900 039	1 009 409 236
9	Rokan Hilir	610 374 362	477 232 320
10	Kepulauan Meranti	362 825 308	393 265 565
Kota		1 598 825 739	1 493 924 498
71	Pekanbaru	958 138 369	1 007 259 759
72	Dumai	640 687 370	486 664 739
JUMLAH		8 627 797 929	7 969 442 525

*) APBD

Tabel 7.3 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA BUNGA
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		0	0
1	Kuantan Singingi	0	0
2	Indragiri Hulu	0	0
3	Indragiri Hilir	0	0
4	Pelalawan	0	0
5	Siak	0	0
6	Kampar	0	0
7	Rokan Hulu	0	0
8	Bengkalis	0	0
9	Rokan Hilir	0	0
10	Kepulauan Meranti	0	0
Kota		0	0
71	Pekanbaru	0	0
72	Dumai	0	0
JUMLAH		0	0

*) APBD

Tabel 7.4 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		17 191 616	24 578 211
1	Kuantan Singingi	0	0
2	Indragiri Hulu	0	0
3	Indragiri Hilir	0	2 000 000
4	Pelalawan	0	0
5	Siak	2 190 864	5 627 623
6	Kampar	2 723 332	3 177 221
7	Rokan Hulu	0	0
8	Bengkalis	4 853 980	9 707 959
9	Rokan Hilir	7 423 440	4 065 408
10	Kepulauan Meranti	0	0
Kota		14 321 623	5 442 720
71	Pekanbaru	14 321 623	3 000 000
72	Dumai	0	2 442 720
JUMLAH		31 513 239	30 020 931

*) APBD

Tabel 7.5 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		324 810 575	241 928 270
1	Kuantan Singingi	10 230 964	22 347 600
2	Indragiri Hulu	500 000	0
3	Indragiri Hilir	61 101 031	50 467 400
4	Pelalawan	18 049 413	21 572 200
5	Siak	25 409 721	17 074 400
6	Kampar	64 595 532	23 645 600
7	Rokan Hulu	17 727 090	13 816 000
8	Bengkalis	78 442 810	35 371 600
9	Rokan Hilir	18 580 614	17 633 470
10	Kepulauan Meranti	30 173 400	40 000 000
Kota		56 160 780	33 446 000
71	Pekanbaru	50 790 780	25 156 000
72	Dumai	5 370 000	8 290 000
JUMLAH		380 971 355	275 374 270
*) APBD			

Tabel 7.6 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		44 216 980	67 237 847
1	Kuantan Singingi	5 787 650	6 000 000
2	Indragiri Hulu	0	200 000
3	Indragiri Hilir	610 000	550 938
4	Pelalawan	6 150 750	3 862 750
5	Siak	14 042 480	31 562 420
6	Kampar	8 857 300	10 151 739
7	Rokan Hulu	337 000	2 010 000
8	Bengkalis	0	0
9	Rokan Hilir	8 431 800	9 500 000
10	Kepulauan Meranti	0	3 400 000
Kota		0	6 175 750
71	Pekanbaru	0	3 403 250
72	Dumai	0	2 772 500
JUMLAH		44 216 980	73 413 597

*) APBD

Tabel 7.7. REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		185 491 096	29 900 208
1	Kuantan Singingi	162 448 172	0
2	Indragiri Hulu	4 551 341	4 088 843
3	Indragiri Hilir	3 967 724	4 811 365
4	Pelalawan	0	0
5	Siak	835 529	1 200 000
6	Kampar	2 894 389	0
7	Rokan Hulu	3 794 641	6 300 000
8	Bengkalis	6 999 300	13 500 000
9	Rokan Hilir	0	0
10	Kepulauan Meranti	0	0
Kota		0	0
71	Pekanbaru	0	0
72	Dumai	0	0
JUMLAH		185 491 096	29 900 208

*) APBD

Tabel 7.8 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		1 788 655 268	2 435 593 519
1	Kuantan Singingi	688 257	224 399 153
2	Indragiri Hulu	196 804 843	235 548 392
3	Indragiri Hilir	237 457 842	278 980 947
4	Pelalawan	151 109 533	178 494 745
5	Siak	165 071 306	215 298 160
6	Kampar	230 892 045	295 668 776
7	Rokan Hulu	152 253 272	210 978 011
8	Bengkalis	365 216 019	401 681 302
9	Rokan Hilir	203 439 094	243 544 033
10	Kepulauan Meranti	85 723 057	151 000 000
Kota		3 055 328	3 652 769
71	Pekanbaru	999 886	1 000 000
72	Dumai	2 055 442	2 652 769
JUMLAH		1 791 710 596	2 439 246 288

*) APBD

Tabel 7.9 REALISASI PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG UNTUK BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		5 716 775	41 035 374
1	Kuantan Singingi	0	3 759 500
2	Indragiri Hulu	1 818 000	1 000 000
3	Indragiri Hilir	0	892 000
4	Pelalawan	0	700 000
5	Siak	166 000	1 000 000
6	Kampar	166 000	10 250 000
7	Rokan Hulu	3 120 425	2 500 000
8	Bengkalis	446 350	18 933 874
9	Rokan Hilir	0	1 000 000
10	Kepulauan Meranti	0	1 000 000
Kota		1 310 106	1 500 000
71	Pekanbaru	1 286 106	1 000 000
72	Dumai	24 000	500 000
JUMLAH		7 026 881	42 535 374

*) APBD

Tabel 7.10 REALISASI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		8 462 622 572	8 843 479 876
1	Kuantan Singingi	417 924 798	539 495 667
2	Indragiri Hulu	692 744 310	643 258 582
3	Indragiri Hilir	833 854 913	1 074 106 865
4	Pelalawan	921 046 975	843 474 101
5	Siak	856 731 289	680 196 840
6	Kampar	916 230 710	789 426 643
7	Rokan Hulu	633 228 040	673 862 060
8	Bengkalis	1 643 876 065	2 212 657 550
9	Rokan Hilir	1 002 578 372	796 206 628
10	Kepulauan Meranti	544 407 100	590 794 940
Kota		1 466 862 732	2 338 712 031
71	Pekanbaru	1 000 026 690	1 561 371 267
72	Dumai	466 836 042	777 340 764
JUMLAH		9 929 485 304	11 182 191 907

*) APBD

**Tabel 7.11 REALISASI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017**

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		1 100 164 879	846 189 733
1	Kuantan Singingi	0	98 492 016
2	Indragiri Hulu	35 078 857	22 596 023
3	Indragiri Hilir	86 324 578	61 343 819
4	Pelalawan	166 904 058	158 068 941
5	Siak	179 307 503	14 817 488
6	Kampar	76 726 601	52 127 717
7	Rokan Hulu	98 653 829	95 426 000
8	Bengkalis	149 506 613	69 313 550
9	Rokan Hilir	217 338 148	165 209 274
10	Kepulauan Meranti	90 324 692	108 794 905
Kota		52 499 537	402 319 946
71	Pekanbaru	0	239 130 132
72	Dumai	52 499 537	163 189 814
JUMLAH		1 152 664 416	1 248 509 679

*) APBD

Tabel 7.12 REALISASI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		3 852 098 618	4 665 890 647
1	Kuantan Singingi	239 908 435	231 626 271
2	Indragiri Hulu	410 687 695	391 790 402
3	Indragiri Hilir	418 475 910	575 044 637
4	Pelalawan	299 458 789	385 166 615
5	Siak	424 663 198	569 360 943
6	Kampar	461 781 872	498 112 348
7	Rokan Hulu	282 222 731	320 229 401
8	Bengkalis	728 626 506	1 020 386 065
9	Rokan Hilir	385 596 091	393 216 543
10	Kepulauan Meranti	200 677 391	280 957 422
Kota		763 855 390	972 151 803
71	Pekanbaru	549 684 919	646 311 633
72	Dumai	214 170 471	325 840 170
JUMLAH		4 615 954 008	5 638 042 450

*) APBD

Tabel 7.13 REALISASI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		3 510 359 075	3 331 399 496
1	Kuantan Singingi	178 016 363	209 377 380
2	Indragiri Hulu	246 977 758	228 872 157
3	Indragiri Hilir	329 054 425	437 718 409
4	Pelalawan	454 684 128	300 238 545
5	Siak	252 760 588	96 018 409
6	Kampar	377 722 237	239 186 578
7	Rokan Hulu	252 351 480	258 206 659
8	Bengkalis	765 742 946	1 122 957 935
9	Rokan Hilir	399 644 133	237 780 811
10	Kepulauan Meranti	253 405 017	201 042 613
Kota		650 507 805	964 240 282
71	Pekanbaru	450 341 771	675 929 502
72	Dumai	200 166 034	288 310 780
JUMLAH		4 160 866 880	4 295 639 778

*) APBD

Tabel 7.14 REALISASI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK PEMBIAYAAN
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI RIAU (ribu rupiah), 2016-2017

Kabupaten/Kota		2016	2017*)
(1)		(2)	(3)
Kabupaten		526 466 965	680 407 760
1	Kuantan Singingi	29 785 847	0
2	Indragiri Hulu	38 018 311	0
3	Indragiri Hilir	233 660 540	15 700 000
4	Pelalawan	57 810 665	216 562 713
5	Siak	12 298 000	135 000 000
6	Kampar	62 666 603	0
7	Rokan Hulu	48 952 381	0
8	Bengkalis	14 248 299	0
9	Rokan Hilir	7 585 852	275 345 048
10	Kepulauan Meranti	21 440 467	37 799 999
Kota		124 414 711	36 746 371
71	Pekanbaru	82 090 162	21 957 734
72	Dumai	42 324 549	14 788 637
JUMLAH		650 881 676	717 154 131

*) APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No 12, Pekanbaru 28131
Telepon : (0761) 23042 Fax : (0761) 21336
Homepage : <http://riau.bps.go.id>
Email : bps1400@bps.go.id